

DAFTAR ISI

Tantangan Peradilan Tata Usaha Negara di Era Birokrasi Digital <i>Prof. Dr. Supandi S.H., M.Hum.</i>	1
Diskresi Pemerintah di Era Birokrasi Digital <i>Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.</i>	3
Dinamika Kebijakan Perizinan Berusaha di Era Birokrasi Digital <i>Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.</i>	14
Pengawasan Pelayanan Publik di Era Birokrasi Digital (Kedudukan Lembaga Pengawas Eksternal dalam Reformasi Birokrasi & E-Gov) <i>Mokhammad Najih, S.H., M.Hum., Ph.D.</i>	17
Naskah Prosiding	
Pendaftaran Tanah sebagai Upaya Kepastian Hukum dan Pencegahan Konflik <i>Mukmin Zakie, Mustika Prabaningrum Kusumawati</i>	20
Menelisik Tujuan Pendaftaran Tanah Menuju Keadilan Bagi Pemegang Hak Atas Tanah <i>Danang Adi Nugraha, Satria Sukananda</i>	31
Implementasi Konsep <i>Land Banking</i> dalam Penyediaan Lahan Perumahan di Indonesia <i>Diyah Kun Mariati, Lego Karjono</i>	44
Legalitas Sertipikat Tanah Elektronik dan Permasalahannya (Tantangan Sektor Pertanahan di Era <i>E-Government</i>) <i>Muhammad Adiguna Bimasakti</i>	54
Urgensi dan Keamanan Digitalisasi Dokumen Penerbitan Sertifikat Elektronik Tanah <i>Nur Rohman</i>	65
Pembaharuan Hukum Administrasi Negara dalam Reformasi Hukum Agraria di Era Digital <i>MM. Thanisa Dita Murbarani</i>	75
Kajian Yuridis Terkait Jual Beli Tanah Antara PT. Amanah Agung Selaras dengan Ahli Waris dari Simpar yang Tercantum pada Sertipikat Hak Milik Nomor: 1289 <i>Kartika Cahyaningtyas, Albertus Sentot Sudarwanto</i>	83
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Jalan Tol Solo-Yogya <i>Muhammad Faza Abyan Naufal, Isharyanto, Jadmiko Anom Husodo</i>	92
Politik Hukum Lingkungan Hidup dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum Pasca Berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja <i>Marojahan JS Panjaitan</i>	100
Penguatan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup <i>Yasminingrum</i>	110
Proses Administrasi Online yang Merupakan Perlindungan Lingkungan Hidup <i>Haris Putra Widagdo, Agus Riwanto, Rahayu Subekti</i>	119
Kebijakan Kepala Daerah dalam Komitmen Ruang Terbuka Hijau	

<i>Seto Sanjoyo</i>	128
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Prinsip <i>Reduce, Reuse, Recycle</i> untuk Mewujudkan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Kota Cimahi	
<i>Netty Songtiar Rismauly Naiborhu</i>	137
Kedudukan Hukum Administrasi Negara dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Upaya Penataan Hukum Lingkungan	
<i>Josua Hari Mulya</i>	148
Pembatalan Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Konawe Kepulauan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	
<i>Budiarto Suselmen</i>	157
Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko terhadap Pengawasan Perizinan Berusaha di Daerah	
<i>Allan Fatchan Gani Wardhana, Ahmad Ilham Wibowo</i>	166
Potret Pengaturan Manajemen Krisis Kepariwisata di Kota Yogyakarta pada Masa Pandemi Covid-19	
<i>Yuniar Riza Hakiki</i>	176
Peran Lembaga Ombudsman DIY dalam Pengawasan Pelayanan Publik pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Pergub DIY Nomor 69 Tahun 2014	
<i>Anom Wahyu Asmorojati, Indah Febri Sonia</i>	187
Peran Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Pembangunan Birokrasi E-Government yang Baik di Era Digital	
<i>MG. Thesa Deta Murbasari</i>	198
<i>Unitary Executive</i> sebagai Solusi atas Alih Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi	
<i>Moh. Rizaldi</i>	209
Kajian Tentang Penghapusan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	
<i>Fitrhiatus Shalihah</i>	220
Urgensi <i>Paternity Leave</i> bagi Kesejahteraan Hak Pekerja di Indonesia	
<i>Rahmadina Bella Mahmuda, Eka Detik Nurwagita, Kuniati Mulqiyah</i>	231
Penerapan E-Government dalam Upaya Mewujudkan Perlindungan di Bidang Ketenagakerjaan	
<i>Dresdiando Samodra</i>	243
Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Online	
<i>Pandu Widya Pratama, Munawar Kholil, Jadmiko Anom Husodo</i>	251
Penguatan Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Pemerintahan Daerah: Gagasan APIP sebagai <i>Quasi</i> Nasional dan Independen	
<i>Muhamad Saleh, Taufiqurrahman</i>	261
Penataan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Kajian Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004)	
<i>Retno Widiastuti</i>	275

<i>Legal Standing</i> Prinsip Keyakinan Hakim dalam Menetapkan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi <i>Beni Kurnia Illahi, Sonia Ivana Barus, Pipi Susanti</i>	284
Analisis Yuridis Pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) terhadap Kegiatan Selebgram yang Melakukan Endorsement di Media Sosial <i>Esti Anisa Pamungkas</i>	297
Legalitas Penyelenggaraan Retribusi Secara Elektronik di Kota Yogyakarta <i>Muhammad Addi Fauzani, Aprillia Wahyuningsih</i>	306
Arah Kebijakan Sanksi Administrasi Perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditinjau dari Asas Pemungutan Pajak <i>Siti Rahma Novikasari</i>	316
Analisis Putusan dengan Amar Tidak Dapat Diterima terhadap Gugatan yang Melampaui Waktu Tempuh Upaya Administratif (Studi Kasus Putusan Perkara Ibrahim Malik melawan Rektor Universitas Islam Indonesia) <i>Rizky Ramadhan Barried</i>	329
Implementasi Pasal 19 ayat (2) Undang – Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Terhadap Kewajiban Perusahaan Membayar Iuran di Daerah Istimewa Yogyakarta <i>Annisa Mutiara Ridwan, Mukmin Zakie</i>	341
Implikasi Pengaturan Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 <i>Muhammad Hanif Mahsabihul Ardhi, Allan Fatchan Gani Wardhana</i>	356
Perlindungan Hukum Bagi Isteri Terhadap Harta Bersama Yang Dijaminkan Dalam Perkawinan Poligami <i>Irene Ausya Ardiningrum Wardaya, Nurjihad</i>	370
Pembatalan Akta Jual Beli Hak atas Tanah yang Dibuat Dihadapan PPAT Kabupaten Cirebon (Studi Putusan No.22/Pdt.G/2016/PN.Sbr) <i>Fathurrachman Alfathan, Pandam Nurwulan</i>	387
Kewenangan Penghentian Penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019) <i>Panji Prakuso, Syarif Nurhidayat</i>	404
Perlindungan Konsumen atas Pembebanan Biaya Kirim Retur Barang Tidak Sesuai Pesanan dalam <i>E-Commerce</i> <i>Dewi Maimunah Mubaroh, Siti Hapsah Isfardiyana</i>	420
Pemenuhan Nafkah Hadhanan Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Bantarujeg <i>Sindy Septiani Lestari, Abdul Jamil</i>	434
Keabsahan Tanda Tangan Digital dalam Perjanjian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik <i>Rizaldi Bramantya Ardiansyah, Ridwan Khairandy</i>	449
Perlindungan Hukum Bagi Retail Investor Atas Aktivitas <i>Pump and Dump</i> Dalam Transaksi Saham Pada Pasar Modal (Pengaturan <i>Pump and Dump</i> Indonesia dan Amerika Serikat) <i>Safira Fitri Maani, Ratna Hartanto</i>	460

Tinjauan Hukum Pidana Dan Viktimologi Terhadap <i>Cyberbullying</i> Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik <i>Muhammad Yusuf Saifurrahman, Syarif Nurhidayat</i>	475
Kriminalisasi Pers Oleh Aparat Atas Peliputan Aksi Demonstrasi Mahasiswa (Studi Kasus Demonstrasi RKUHP dan Omnibus Law 2019-2020) <i>Rada Yulia Putri, Ari Wibowo</i>	489